

RINGKASAN

Prioritas perencanaan pembangunan adalah aspek penting bagi pemerintah daerah untuk menentukan arah pembangunan dengan mempertimbangkan sumber daya yang dimiliki. Perencanaan ini berperan penting dalam pengentasan kemiskinan, karena keduanya saling terkait dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Bappelitbangda bertanggung jawab memastikan perencanaan pembangunan untuk pengentasan kemiskinan berjalan sesuai prosedur dan menghasilkan penurunan kemiskinan yang signifikan. Penelitian ini bertujuan menganalisis penetapan prioritas dan partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan untuk pengentasan kemiskinan. Penelitian ini dikaji menggunakan aspek-aspek perencanaan pembangunan menurut M.L. Jhingan yang meliputi prioritas, dan partisipasi masyarakat.

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus dengan sasaran penelitian yang ditentukan melalui teknik *purposive sampling*. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, observasi dan dokumentasi yang dianalisis menggunakan metode analisis interaktif Miles dan Huberman. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perencanaan di Bappelitbangda telah mengikuti pendekatan partisipatif, teknokratis, dan politis. Penentuan prioritas yang baik terbukti mampu untuk menurunkan angka kemiskinan meskipun belum signifikan. Dalam penetapan prioritas Bappelitbangda Purbalingga melewati beberapa proses seperti Musrenbang dari tingkat desa hingga kabupaten di tingkat akhir untuk menetapkan rancangan prioritas yang sudah disusun sebelumnya, forum OPD digunakan sebagai wadah untuk melakukan harmonisasi antar sektor guna menghindari tumpang tindih program. proses ini juga melibatkan berbagai pemangku kepentingan lain, seperti akademisi, LSM, dan sektor swasta, yang memberikan perspektif tambahan untuk memperkaya substansi perencanaan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Musrenbang di Kabupaten Purbalingga telah dilaksanakan sesuai prosedur dan melibatkan berbagai elemen masyarakat, seperti perangkat desa, tokoh masyarakat, dan perwakilan organisasi masyarakat dan LSM. Tetapi tingkat partisipasi peserta forum sangat beragam. Pemerintah Kabupaten Purbalingga juga melibatkan sektor swasta didalamnya melalui CSR, namun pendataan *Corporate Social Responsibility* (CSR) di Kabupaten Purbalingga masih belum terkelola dengan baik, sehingga menyulitkan proses pemantauan terhadap kegiatan CSR yang ada.

Kesimpulan penelitian ini adalah secara keseluruhan prioritas perencanaan pembangunan dalam pengentasan kemiskinan sudah berjalan sesuai prosedur yang ada dan memiliki hasil penurunan angka kemiskinan, namun masih perlu dilakukan perbaikan. Implikasi yang dapat dilakukan adalah melakukan perbaikan data, meningkatkan koordinasi antar lembaga dan optimalisasi kemitraan harus terus dilakukan agar perencanaan pembangunan lebih efektif dalam mengurangi angka kemiskinan.

Kata Kunci: Perencanaan Pembangunan, Prioritas, Partisipasi Publik, Pengentasan Kemiskinan

SUMMARY

Priority development planning is an important aspect for local governments to determine the direction of development by considering the resources they have. This planning plays an important role in alleviating poverty, because the two are interrelated in efforts to improve community welfare. Bappelitbangda is responsible for ensuring that development planning for poverty alleviation runs according to procedures and results in a significant reduction in poverty. This research aims to analyze priority setting and community participation in development planning for poverty alleviation. This research was studied using aspects of development planning according to M.L. Jhingan which includes priorities and community participation.

This research uses a qualitative method with a case study approach with research targets determined through purposive sampling techniques. Data collection was carried out through interviews, observations and documentation which were analyzed using the Miles and Huberman interactive analysis method. The research results show that planning at Bappelitbangda has followed a participatory, technocratic and political approach. Determining good priorities has been proven to be able to reduce poverty rates, although not yet significantly. In setting priorities, Bappelitbangda Purbalingga goes through several processes such as Musrenbang from the village level to the district level at the final level to determine the priority plans that have been previously prepared. The OPD forum is used as a forum for harmonization between sectors to avoid overlapping programs. This process also involves various other stakeholders, such as academics, NGOs, and the private sector, which provide additional perspectives to enrich the planning substance. The results of this research show that Musrenbang in Purbalingga Regency has been implemented according to procedures and involves various elements of society, such as village officials, community leaders, and representatives of community organizations and NGOs. But the level of participation of forum participants varies widely. The Purbalingga Regency Government also involves the private sector through CSR, however, Corporate Social Responsibility (CSR) data collection in Purbalingga Regency is still not well managed, making the process of monitoring existing CSR activities difficult.

The conclusion of this research is that overall development planning priorities in poverty alleviation have been running according to existing procedures and have resulted in reducing poverty rates, but improvements still need to be made. The implications that can be made are that improving data, improving coordination between institutions and optimizing partnerships must continue to be carried out so that development planning is more effective in reducing poverty.

Keywords: Development Planning, Priorities, Community Support, Poverty Alleviation